

KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN CIAMIS (Studi Tentang Wisata Di Panjalu)

Amalul Ikraam

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : ikraamamalul@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator masalah yaitu Kurang adanya koordinasi antara pihak Pemerintah dengan pihak swasta dalam proses menjalani Kemitraan yang bakal dilakukan dan Masih rendahnya sosialisasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis selaku salah satu pengelola Situs Wisata Panjalu mengenai aktifitas kepariwisataan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ciamis secara umum kurang dilaksanakan secara optimal karena terdapat hambatan-hambatan, seperti Kurangnya melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk berkolaborasi, tidak adanya jangka waktu yang ditentukan untuk bisa berkolaborasi dengan pihak swasta, tidak adanya kedudukan para pihak investor dalam berkolaborasi, serta kurang efektifnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan wisata.. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dilakukan upaya diantaranya mengoptimalkan unsur-unsur kolaborasi atau kemitraan.

Kata Kunci : *Kolaborasi, Pengembangan Pariwisata, Desa Panjalu*

PENDAHULUAN

Pariwisata salah satu tentang yang sangat berguna bagi suatu negara. pariwisata ada peran bernilai dalam menaikkan aktifitas perekonomian masyarakat di suatu wilayah, obyek wisata itu berkecukupan mendapat penghasilan dari penghasilan setiap obyek wisata. Pariwisata menggambarkan potensi wisata yang

dimiliki setiap daerah, baik yang berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan, dan lain- lain. Tentang ini mengindikasikan jika setiap daerah mempunyai berbagai potensi wisata yang dapat digali, diolah, dikelola dan juga dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap sarana hiburan maupun sarana rekreasi.

Pembangunan dalam pariwisata merupakan salah satu bagian yang potensial yang perlu dikembangkan, tentang ini sesuai pernyataan "Tourism can be a potent development tool, generating economic growth, diversifying the economy, contributing to poverty alleviation and also creating backward and forward linkages to other production and service sectors. (Iain T. Christie and D. Elizabeth Crompton, 2003, h. 63)." Pariwisata bisa sebagai alat pengembangan yang potensial, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan hubungan timbal balik dengan pembuatan lainnya dan bagian penyedia jasa".

Tentang ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai potensi wisata yang dapat digali dan juga dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana liburan, rekreasi keluarga dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata. Pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan budaya serta rasa cinta terhadap tanah air. Untuk tercapainya pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang berdaya guna dan berhasil mendukung pembangunan kepariwisataan perlu pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung oleh seluruh stakeholder kepariwisataan, baik yang terikat langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan dan pengelolaan satu buah destinasi pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan pada Pasal 2 yakni: a. melestarikan; mndayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata Yang ada keunggulan energi saing b. menambah penghasilan asli daerah dalam rangka menunjang kemahiran perkembangan serta kemandirian perekonomian daerah c. memperluas serta pemeratakan peluang berupaya serta lapangan kerja d. memupuk rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air guna menambah persahabatan antar daerah dan bangsa. e. menambah citra daerah f. memperkuat kearifan local g. menggali dan memajukan potensi ekonomi, kewirausahaan, social, budaya, serta teknologi komunikasi lewat aktifitas kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk, sebagai peningkatan citra Kepariwisataan h. mengoptimalkan pendayagunaan pembuatan local, regional serta nasional. i. mewujudkan guna hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk, sebagai peningkatan citra kepariwisataan Daerah Kabupaten Ciamis.

Dalam pengembangan Objek Wisata Situ Panjalu, program yang sedang di luncurkan berupa kualitas akses jalan yang berasal dari bantuan dana Pemprov Jawa Barat diharapkan

dengan adanya bantuan dari pemprov provinsi bisa menambah kualitas dari objek wisata situ panjalu.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Dinas Pariwisata dan Wisata di Panjalu, tampak jika kolaborasi antar institusi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis masih belum optimal, tentang itu tampak dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurang adanya koordinasi antara pihak Pemerintah dengan pihak swasta dalam proses menjalani Kemitraan yang bakal dilakukan, penjelasan dari pihak swasta mengenai ketentuan alur dan prosedur yang patut dipenuhi masih kurang, kategori aktifitas yang bakal diselenggarakan Oleh pihak swasta masih melalui persyaratan seleksi panjang yang ditetapkan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
2. Masih rendahnya sosialisasi Oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis selaku salah satu pengelola Situs Wisata Panjalu mengenai aktifitas kepariwisataan. yang berakibat pada rendahnya partisipasi penduduk sekitar dalam program pengembangan dan pengelolaan pariwisata, sementara itu dengan pengembangan pariwisata ini sanggup berfungsi terhadap peningkatan penghasilan perekonomian penduduk itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi Sama dengan Kolaboratif apa yang dikemukakan Menurut Dwiyanto (Subarsono, 2016:177) memaparkan secara terperinci jika:

Kerjasama kolaboratif berlangsung penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara para pihak, mereka masing masing tapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen serta memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walau mereka tunduk pada kesepakatan Bersama.

Ansell dan Gash (2017: 546) Mendefinisikan Collaborative Governance sebagai berikut ini:

Collaborative Governance yakni serangkaian pengaturan dimana satu maupun lebih Lembaga publik yang menyertakan secara langsung stakeholder non- state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk menciptakan maupun mengimplementasikan kebijakan

publik maupun mengatur program maupun aset.

2. Collaborative Governance dan public Private Partnership

Subarsono (2016:178) sebagai berikut:

- 1) Prinsip Collaborative
Memulai satu buah Kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar segala pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing- masing.
- 2) Pemberdayaan (empowering)
Kelompok Penduduk tidak sedikit yang ada potensial atas kemahiran yang dimiliki, akan tetapi terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran dan teknologi. Sehingga dari itu dalam aktifitas pemberdayaan penduduk, pemerintah sanggup berperan melalui:
 - a. Pengurangan hambatan dan gangguan partisipasi penduduk.
 - b. Menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada penduduk untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan (social learning process).

3. Model Kolaborasi

Menurut Subarsono (2016: 197) Kolaborasi (Public Private Partnership) Mempunyai dua model yakni:

1) Desain kontrak pelayanan, Build-Operate- Transfer (BOT)

menggambarkan bentuk Kerjasama dimana mitra swasta bertanggungjawab membangun proyek infrastruktur, terhitung membiayainya, yang sesudah itu dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaannya, yang sesudah itu proyek tersebut diserahkan kepada Pemerintah pada suatu jangka waktu tertentu. Menurut Mema dan amp; Smith (1996) keuntungan- keuntungan dari pelaksanaan proyek dengan BOT adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya konsolidasi antara Perusahaan- perusahaan yang mempunyai keterampilan di bidangnya masyarakat- masyarakat di dalam organisasi promotor, sehingga bisa jadi untuk merealisasikan proyek menjadi lebih besar.
- b. Sanggup sebagai tolak ukur efisiensi atas proyek menjadi lebih besar
- c. Akan berlangsung transfer teknologi dari promotor kepada principal karna keikutsertaan promotor dalam pengoprasian selama masa konsensi.
- d. Pengalihan efek konstruksi, keuangan dan pengoprasian kepada pihak swasta

2) Desain- Build- Lease (DBL)

DBL menggambarkan kontrak yang bersifat kombinasi antar swasta dengan pemerintah dimana

dari sisi Pemerintah diambil system pendanaan yang ada bunga rendah bilamana dari sisi pemerintah melangsungkan peminjaman sementara itu dari sisi swasta diambil esensi dari organisasi.

Menurut Dwiyanto (2015:251-258) dikatakan bahwa kolaborasi atau kemitraan adalah perpaduan unsur-unsur tertentu yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik yang dapat dibangun dengan beberapa unsur yaitu:

1. Sifat Kerjasama
2. Intensitas
3. Jangka Waktu
4. Kedudukan para pihak
5. Manfaat dan resiko
6. Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan

Dwiyanto (Subarsono, 2016:177) memaparkan secara terperinci jika:

Kerjasama kolaboratif berlangsung penyamaan visi, tujuan, Bersamaan dengan pendapat ahli tersebut menurut Sink (1998) dalam (Dwiyanti, 2011: 253) jika:

Kerjasama Kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu kasus tertentu berusaha strategi, dan aktivitas antara para pihak, mereka masing masing tapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen serta memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walau mereka tunduk pada kesepakatan

Bersama. Mencari penyelesaian yang ditentukan secara Bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak sanggup mencapainya secara sendiri-sendiri.

Dwiyanto (2015:256) menyatakan bahwa:

Jangka waktu adalah sifat kerjasama yang membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang dari kedua pihak dan karena itu memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak.

Dwiyanto (2015: 251) menyatakan bahwa:

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri.

Dwiyanto (2015: 258) menyatakan bahwa:

Pemanfaatan kemitraan untuk mengembangkan sistem pemantauan kebijakan publik tertentu sangat bermanfaat dalam meyakinkan publik mengenai realitas kebijakan.

Menurut Bimantor, dalam Subarsono (2016: 189) Desain– Build– Lease yakni sebagai berikut:

Dalam skema DBL, Desain–Build– Lease yakni pihak swasta tidak mengeluarkan dana untuk investasi sarana infrastruktur tapi Pemerintah yang membiayai pekerjaan desain dan konstruksi sehingga Pemerintah Daerah sebagai contracting agency yang memberikan hak kepada operator untuk mendesain, membangun dan mengoperasikan.

3. Kolaborasi Pengembangan Dalam Pariwisata

Ansell dan Gash (2017: 546) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai berikut ini:

Collaborative Governance yaitu serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih Lembaga public yang melibatkan secara langsung stakeholder non- state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik maupun mengatur program maupun aset.

Menurut Yoeti (2009: 187) mengemukakan bahwa:

Berkembangnya suatu objek wisata tergantung pada produk industri pariwisata yang meliputi daya Tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas dan juga promosi.

Sementara itu menurut Dimiyanti (2008: 87) jika:

Pengembangan kepariwisataan sanggup didefinisikan secara

eksklusif sebagai upaya penyediaan maupun peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Tetapi secara lebih umum pengertiannya dapat mencakup juga dampak- dampak yang terkait seperti penyerapan/ penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan/ peningkatan pendapat.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui kolaborasi antar institusi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis dapat ditinjau dari teori Dwiyanto (2015:251-258) mengenai unsur-unsur kolaborasi atau kemitraan adalah sebagai berikut: Sifat Kerjasama, Intensitas, Jangka Waktu, Kedudukan para pihak, Manfaat dan resiko serta Sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk penjelasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

a. Sifat Kerjasama

1) Adanya Kerjasama melibatkan setidaknya – tidaknya satu Lembaga pemerintah dan satu Lembaga swasta

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa Kerjasama melibatkan setidaknya – tidaknya satu Lembaga pemerintah dan satu Lembaga swasta belum terjalin dengan baik. Hal ini karena dari hasil wawancara dan hasil observasi masih kurang terjalin hubungan kerjasama maupun kolaborasi yang dilakukan antara pihak pemerintah dengan swasta terkait pengembangan wisata Situ Lengkong Panjalu. Dalam mengembangkan wisata tersebut tidak menyepakati adanya kerjasama yang melibatkan pihak swasta untuk memajukan wisata tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2017: 546) Mendefinisikan Collaborative Governmance sebagai berikut ini:

Collaborative Governmance yakni serangkaian pengaturan dimana satu maupun lebih Lembaga publik yang menyertakan secara langsung *stakeholder non- state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi *consensus* dan *deliberative* yang bertujuan untuk menciptakan maupun mengimplementasikan kebijakan publik maupun mengatur program maupun aset.

Dengan demikian, teori ahli menunjukkan bahwa tidak adanya

kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Hal ini karena tidak adanya konsolidasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai kelebihan di dalam bidang pariwisata. Sehingga menghambat pada realisasi proyek pengembangan wisata Panjalu yang dapat menguntungkan semua mitra.

b. Intensitas

1) Adanya Kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi Berdasarkan penelitian

dilapangan dapat dianalisis bahwa Kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi sudah berjalan baik. Hal ini dengan adanya kolaborasi untuk membangun tujuan bersama maka pihak Desa Panjalu melakukan musyawarah bersama para tokoh masyarakat seperti pokdarwis, KSDA serta karang taruna untuk memberikan masukan agar menciptakan tujuan bersama mencapai optimalisasi pengembangan wisata Panjalu di Kabupaten Ciamis. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dwiyanto (Subarsono, 2016:177) memaparkan secara terperinci jika:

Kerjasama kolaboratif berlangsung penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara para pihak, mereka masing masing tapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen serta memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya

walau mereka tunduk pada kesepakatan Bersama.

Dengan demikian, teori ahli menunjukkan bahwa adanya intensitas yang terdapat pada pihak Desa Panjalu, pihak pemerintah serta tokoh masyarakat untuk saling mendukung terhadap perkembangan wisata Panjalu menjadi lebih baik dan unggul.

c. Jangka Waktu

- 1) Adanya Orientasi jangka waktu dalam kolaborasi antar Stakeholder dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Ciamis

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa Orientasi jangka waktu dalam kolaborasi antar Stakeholder dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Ciamis elum memenuhi dalam menggambarkan bentuk kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini pun karena meunggu proses dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Subarsono (2016: 197) Kolaborasi (Public Private Partnership) model yakni:

Desain kontrak pelayanan, Build-Operate-Transfer (BOT): menggambarkan bentuk Kerjasama dimana mitra swasta bertanggungjawab membangun proyek infrastuktur, terhitung membiayainya, yang sesudah itu dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya, yang sesudah itu proyek tersebut diserahkan kepada Pemerintah pada suatu jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, teori ahli menunjukkan bahwa tidak adanya jangka waktu yang jelas untuk ditetapkan dalam mengupayakan kerjasama dengan pihak swasta untuk mencapai tujuan agar wisata di Panjalu menjadi lebih berkembang.

d. Kedudukan Para Pihak

- 1) Adanya penyatuan pemanfaatan, dan sinergi dari sumber daya pemerintah dan swasta

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa penyatuan pemanfaatan, dan sinergi dari sumber daya pemerintah dan swasta belum melakukan pemanfaatan tersebut. Hal ini karena pihak pemerintah kurang berkolaborasi dengan pihak swasta. Sehingga pendayagunaan sumber daya manusia kurang produktif. Ditambah dengan keterbatasan modal dan teknologi pemasaran memacu pada perkembangan wisata di Panjalu.

Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Subarsono (2016:178) sebagai berikut:

1. Prinsip Collaborative
Memulai satu buah Kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar segala pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing- masing.
2. Pemberdayaan (empowering)
Kelompok Penduduk tidak sedikit yang ada potensial atas kemahiran yang dimiliki, akan tetapi terhalang pada keterbatasan modal, pemasaran dan teknologi.

Sehingga dari itu dalam aktifitas pemberdayaan penduduk, pemerintah sanggup berperan melalui:

- a. Pengurangan hambatan dan gangguan partisipasi penduduk.
- b. Menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada penduduk untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan (social learning process).

- 2) Adanya kesetaraan kedudukan di dalam kolaborasi dalam pengembangan objek wisata

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa kesetaraan kedudukan di dalam kolaborasi dalam pengembangan objek wisata belum terlaksana secara optimal. Hal ini karena informan mengatakan masih kurangnya penyatuan pemanfaatan dan sinergi dari sumber daya swasta. sehingga mengakibatkan pula pada anggaran untuk mengembangkan wisata Panjalu. Tidak hanya itu saja melaikan sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata di Panjalu pasti kurang cukup apabila kurangnya kolaborasi dari pihak swasta.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2015: 251) menyatakan bahwa:

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus

juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena mereka memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri.

Dengan demikian pada dimensi kedudukan para pihak menunjukan bahwa dari pihak pemerintah yang tidak memanfaatkan kemitraan bersama para investor ataupun stakeholder untuk membantu promosi pemasaran, anggaran serta dapat meningkatkan produktivitas serta sinergi sumber daya manusia dalam melakukan perkembangan wisata di Panjalu

e. Manfaat dan Resiko

- 1) Dalam Kerjasama dapat mendorong adanya pertukaran nilai, tradisi, dan keahlian dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Ciamis

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa Dalam Kerjasama dapat mendorong adanya pertukaran nilai, tradisi, dan keahlian dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Ciamis sudah dilakukan dengan baik. Hal ini karena pihak desa, pihak pemerintah dan pihak pendukungnya sama-sama bekerjasama membuat kebijakan dengan keahlian yang dimilikinya untuk mengembangkan pariwisata di Panjalu.

Hal ini sejalan dengan Smith (1990) menyatakan bahwa:

Manajemen resiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan

kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Maka dari itu tidak adanya hambatan yang terjadi dan tidak ada yang perlu diupayakan untuk adanya pertukaran nilai, tradisi, dan keahlian dalam pengembangan objek wisata Kabupaten Ciamis baik.

f. Sumber Daya Untuk Pelaksanaan Kegiatan

1) Efektivitas Sumber Daya

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat dianalisis bahwa Efektivitas Sumber Daya kurang diperhatikan dengan baik. Pihak yang mengembangkan wisata tidak memperhatikan terkait pengorganisasian berupa pembagian kerja yang perlu dilakukannya oleh pihak terkait. sehingga hal ini menyebabkan saling mengandalkan satu sama lain. Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Menurut Kinner dan Kenneth dalam Setyaningrum (2015:223) bahwa:

Promosi sebagai sebuah mekanisme komunikasi pemasaran, pertukaran informasi antar pembeli dan penjual. Promosi berperan sebagai menginformasikan (to inform), membujuk (to Persuade), dan meningkatkan (to remind) konsumen agar menanggapi (respond) produk atau jasa yang

ditawarkan. Tanggapan yang diinginkan dari kesadaran (awareness) akan keberadaan produk atau jasa sampai pembelian yang sebenarnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil penelitian pada indikator efektivitas sumber daya belum efektif melakukan sosialisasi maupun promosi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis selaku salah satu pengelola situs wisata Panjalu mengenai aktifitas kepariwisataan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi antar institusi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa kolaborasi antar institusi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal, dilihat dari dimensi yang dijadikan alat ukur masih terdapat dimensi yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti: Kurangnya melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk berkolaborasi, tidak adanya jangka waktu yang ditentukan untuk bisa berkolaborasi dengan pihak swasta, tidak adanya kedudukan para pihak investor dalam berkolaborasi, serta kurang efektifnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan wisata. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dilakukan berbagai upaya diantaranya masih rendahnya perjanjian

yang tertulis sebagai bukti kuat dalam pengelolaan kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Desa Panjalu dan pihak pemerintah Kabupaten Ciamis, belum melakukan rencana untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta sehingga jangka waktu untuk berkolaborasi tidak terealisasi dengan baik, kurangnya pemanfaatan sinergi dari sumber daya yang dihasilkan *Collaborative Governance*, serta kurangnya melakukan sosialisasi oleh pengelola wisata terhadap wisatawan terkait pengembangan wisata di Panjalu maka upaya yang sudah dilakukan oleh pihak desa dan pihak pemerintah seperti membuat rancangan rancangan proposal serta melakukan pemasaran maupun promosi agar pihak swasta dapat tertarik untuk menjalin hubungan kerjasama mengenai pengembangan wisata Panjalu, membuat rancangan-rancangan jangka waktu untuk menentukan keberhasilan berkolaborasi apabila sudah terbuat kesepakatan, melakukan pemaksimalan sumber daya manusia pengelola wisata dengan cara memberikan arahan agar menjalankan tugas pengembangan wisata Panjalu menjadi maksimal, serta meningkatkan kualitas, kompetensi pengelola sehingga bisa melaksanakan pengembangan wisata dengan cara mensosialisasikannya, mempromosikannya kepada para penduduk, wisatawan asli Panjalu maupun wisatawan dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

A, Yoeti, Oka. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.Sedarmayanti. (2012). *Good Government (Pemerintah Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

Chris & Gash, Alison. (2009). *Pragmatism and Collaborative Governance*, Department of Political, University of California, Barkeley.

Dwiyanto, A. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.

Dokumen-Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan pada Pasal 2